

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

Komang Adhi Rivani Niagawan¹

Ni Putu Yeni Yuliantari²

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of human resource competence, information systems and quality of information technology on the application of accrual-based government accounting standards. The sample used in this study were 93 people. The data analysis techniques used in this study were the validity test, reliability, classical assumptions, multiple linear regression, coefficient of determination, t test and F test. obtained a regression coefficient value of 0.680 and sig 0.000. (2) the information system has a significant positive effect on the application of SAP, where the regression coefficient value is 0.767 and sig 0.001. (3) IT quality has a significant positive effect on the application of SAP, where the regression coefficient value is 0.719 and sig 0.000 (4) simultaneously HR competence, information systems and IT quality on SAP implementation, where the F value is 96.808 and the significance is 0.000. The amount of influence of the independent variables on the application of SAP is 75.8%.

Keywords: Human Resources Competence, Information Systems and Quality of Information Technology Influence the Implementation of Government Accounting Standards

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini masih terus menerus melakukan reformasi guna untuk mengatur pengelolaan keuangan negara yang baik, reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut melahirkan paket undang-undang yang mengatur di bidang keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 membahas tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 membahas tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Lahirnya ketiga undang-undang yang mengatur bidang keuangan negara tersebut kemudian munculah beberapa

peraturan pemerintah yang pada dasarnya mendukung penerapan undang-undang tersebut dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dan diimplementasikan diseluruh jajaran pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah Peraturan Pemerintah terbaru tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, dalam lampiran II yang isinya menyatakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah suatu instrumen yang sangat penting dan harus disiapkan dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, pemerintahan sudah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Selanjutnya dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan *accrual basis*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah diwajibkan untuk melaksanakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Tujuan tersebut pada dasarnya untuk peningkatan kualitas laporan keuangan guna meningkatkan kredibilitas dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi *Internasional Publik Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *Internasional Federation of Accountant (IFAC)*. Prinsip pengembangan SAP beorientasi pada IPSAS yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, praktik-praktik akuntansi yang berlaku, dan kesiapan sumber daya pengguna SAP.

Pada pemerintahan indonesia, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja sudah menerapkan basis akrual, selama basis akrual belum dilaksanakan maka digunakan basis kas menuju akrual, menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang telah menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pencatatan keuangan berbasis akrual telah sah untuk segera dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan, didalam upaya pemerintah untuk memenuhi dari undang-undang nomor 17 tahun 2003.

Pelaksanaan sistem pelaporan keuangan di indonesia sangat memberikan dampak yang cukup berpengaruh baik dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai meninggalkan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan berbasis kas menuju berbasis akrual dan mulai secara perlahan menjalankan dan menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual secara penuh.

Salah satu tantangan yang mempengaruhi dari keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi, Dan pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi

pemerintahan, Menurut Simanjuntak (2010). Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor pendukung yang sangat penting di dalam mengimplementasikan peraturan pemerintahan baru. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, kualitas dan kapasitas dari sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi peraturan tersebut, Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagus (2015)

Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin membantu manajemen didalam pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat, Menurut *Nash, John F.* (1995:8).

Kualitas teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya. Kualitas teknologi informasi dipengaruhi oleh perangkat keras, perangkat lunak dan manusia, Menurut Ishak (2008). Terdapat alasan perlunya melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah tergolong baru dan amanat undang-undang agar pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali?
2. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali?
3. Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali?

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Untuk dapat lebih mengenal basis akrual (*accrual basis*) yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan juga untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan.

2) Manfaat Praktis

Sebagai referensi dan pengujian dalam melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*) adalah hubungan yang kontraktual antara dua pihak atau lebih. Menurut pendelegasian wewenang (Jensen & Meckling, 1976), prinsipal (*principal*) merupakan pihak yang mempekerjakan pihak lain yang disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama prinsipal.

Pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) merupakan dua bentuk yang muncul dalam masalah keagenan. Pihak manajemen mengelola perusahaan yang salah satu tujuannya untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memperoleh bonus dan fasilitas yang besar dan bagus dari laba yang diperoleh perusahaan. Sedangkan pihak *principal* juga menginginkan keuntungan perusahaan yang besar. Keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan dasar dari pembagian keuntungan yang diperoleh *principal* dari investasi yang ditanamkan pada perusahaan yang bersangkutan. Pemberian bonus dan fasilitas kepada pihak manajemen akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pihak *principal*. Perbedaan kepentingan dari kedua pihak ini melahirkan teori agensi.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan Pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan dan teori keagenan yang dapat diterapkan dalam organisasi publik, Karena pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisien, dan pencapaian tujuan. Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, saat ini pemerintah dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut, Menurut Study #14 IFAC Public Sektor Committee (2002)

Pemerintahan saat ini sudah menggunakan peraturan pemerintahan baru, siap tidaknya suatu organisasi didalam menerapkan informasi atau sistem baru tidak lepas dari peran sumber daya manusianya. Pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan

beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dapat diwujudkan, meskipun penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah dipermudah dengan bantuan aplikasi, kesalahan masih mungkin terjadi jika proses input data yang dilakukan tidak benar, sehingga kemampuan sumber daya manusia tetap memiliki peran yang krusial dalam hal ini. Hal tersebut memberikan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat membantu didalam penerapan peraturan pemerintahan baru, Menurut Fathia (2009).

Sistem informasi merupakan jaringan komunikasi yang fungsi utamanya adalah menyediakan informasi sebagai penunjang yang membantu proses perencanaan, pengendalian serta fungsi manajemen. Dengan demikian, maka segala bentuk proses pekerjaan rutin maupun transaksi manajemen akan tertata dengan rapi. Dalam hal ini sistem informasi memegang peranan penting dalam penerapan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis, dengan adanya komunikasi yang baik produktivitas akan meningkat khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, Menurut Menurut Warsino (2009).

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Bodnar dan Hopwood (1995) memaparkan bahwa teknologi informasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari Perangkat keras (hardware), Perangkat lunak (software) dan Manusia (brainware). Kualitas teknologi informasi diketahui dari kualitas komponen perangkat keras, perangkat

lunak dan kualitas pemakai (manusia), Menurut Kadir dan Triwahyuni (2005).

Penelitian pertama oleh Dewi Utami Putri, Silviana (2017), Universitas Widyatama. Dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung”. Hasil uji penelitian ini memberikan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan fungsi komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung.

Penelitian kedua oleh Fenty Herlina Sari, Bambang Suprasto, A.A.N.B Dwirandra (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Magister Akuntansi, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. Dengan judul “Motivasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi dan Teknologi Informasi pada Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal”. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada penerapan akuntansi berbasis akruwal, sedangkan teknologi informasi berpengaruh positif pada penerapan akuntansi berbasis akruwal. Pengaruh kompetensi SDM pada penerapan akuntansi berbasis akruwal diperkuat oleh motivasi, tetapi motivasi tidak memperkuat pengaruh teknologi informasi pada penerapan akuntansi berbasis akruwal.

Penelitian ketiga oleh Ida Bagus Gede Bayu Permana, I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. Dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbasis AkruaI”. Hasil uji penelitian ini memberikan bukti bahwa pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Sistem Informasi berpengaruh positif signifikan pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

Penelitian ke-empat oleh I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra, Dodik Ariyanto (2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI”. Hasil uji penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI.

Penelitian ke-lima oleh Deswati Supra (2016), Dosen tetap STIE Rahmaniayah Sekayu. Dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin”. Hasil uji penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan kualitas teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akruaI.

Putra dan Amar (2015), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI ketika penyusunan laporan keuangan diperlukan keahlian yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi,

pengakuan dan penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, perhitungan persediaan, serta perhitungan dana cadangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya kompetensi yang baik.

Menurut Bastian, (2006), Pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan agar pemerintah dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Betapa bagusnya Standar Akuntansi Pemerintahan, tanpa didukungnya sumber daya manusia yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Utami Putri, Silviana (2017), Serta Fenty Herlina Sari, Bambang Suprasto, A.A.N.B Dwirandra (2016) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap penerapan akuntansi akrual basis.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.

Menurut Warsino (2009), menyatakan bahwa sistem informasi memegang peranan penting dalam penerapan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis, dengan adanya komunikasi yang baik produktivitas akan meningkat khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

Sistem informasi yang dilakukan dalam suatu organisasi ada dua tipe, yaitu Sistem informasi internal dan eksternal. Tipe sistem informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi internal antara rekan sejawat atau atasan dan Sistem informasi eksternal antar satuan kerja. Sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur standar yang berbeda cukup jauh dari standar yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Maka dari itu diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baru ini dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Gede Bayu Permana, I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Serta I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2016) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Sistem Informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.

Perkembangan akuntansi dalam pemrosesan data, peningkatan informasi, serta kualitas informasi dalam pelaporan keuangan dilihat dari tingkat kualitas teknologi informasi yang memadai. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik, Menurut Suwardjono (2010).

Pemerintahan saat ini menggunakan alat untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Untuk kelangsungan hidup pemerintahan tersebut, maka diperlukan penggunaan teknologi informasi yang memiliki kualitas yang baik. Kualitas teknologi informasi merupakan tingkat dimana sebuah data yang telah di proses memiliki arti bagi para penggunanya, yang biasanya berupa fakta dan suatu nilai yang bermanfaat. Kualitas teknologi informasi terdiri dari relevansi dan realibilitas yang merupakan dua kualitas pokok yang membuat informasi akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Deswati Supra, SE., M.Si (2016), Serta Intan Puspitarini, dkk (2017) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas teknologi informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual.

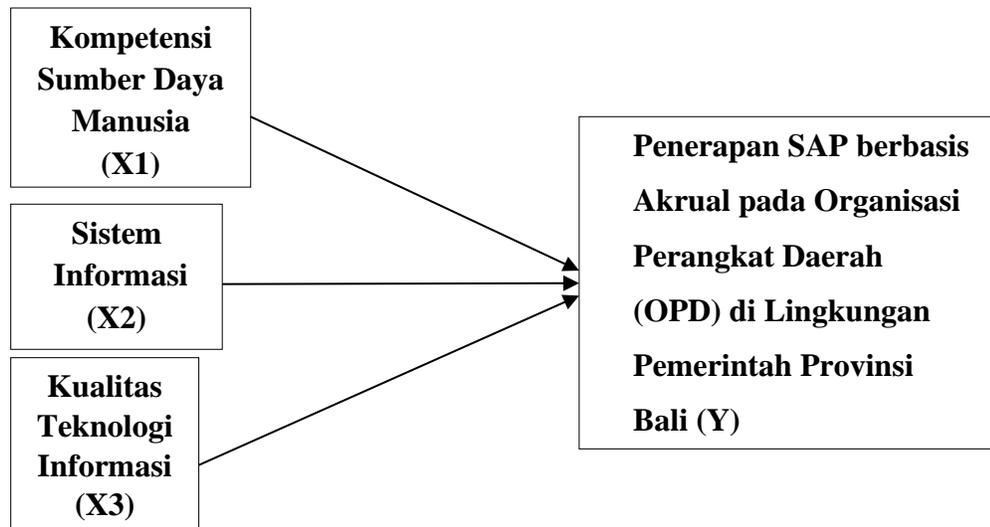
Berdasarkan pembahasan di atas peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif yang berbentuk asosiatif, yaitu meneliti “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali”.

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Variabel Independen yaitu Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya, Menurut Wibowo (2007). Indikator variabel kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan indikator yang sudah dikembangkan oleh Thahier, dkk (2012) meliputi Pengetahuan (*knowledge*), Kemampuan/Keterampilan (*skill*), dan Sikap (*attitude*). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan pengukuran skala likert 1-5. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin

membantu manajemen didalam pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat, Menurut *Nash, John F.* (1995:8). Indikator variabel sistem informasi diukur menggunakan indikator yang sudah dikembangkan oleh Ida Bagus Gede Bayu Permana (2016) meliputi Alat/perangkat pendukung (komputer dan software), Kegunaan alat/perangkat dan Penerapan sistem yang baik. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 3 item pertanyaan dengan pengukuran skala likert 1-5. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Bodnar dan Hopwood (1995) memaparkan bahwa teknologi informasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari Perangkat keras (hardware), Perangkat lunak (software) dan Manusia (brainware). Kualitas teknologi informasi diketahui dari kualitas komponen perangkat keras, perangkat lunak dan kualitas pemakai (manusia), Menurut Kadir dan Triwahyuni (2005). Indikator variabel kualitas teknologi informasi diukur menggunakan indikator yang sudah dikembangkan oleh Supra (2016) meliputi Kualitas perangkat keras (hardware), Kualitas perangkat lunak (software) dan Kualitas manusia/pemakai (brainware). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dengan pengukuran skala likert 1-5.

Variabel Dependen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

pasal 1 ayat 8. Indikator variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diukur menggunakan indikator yang sudah dikembangkan oleh Supra (2016) meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan arus kas, Laporan operasional, Laporan perubahan equitas dan Catatan atas laporan keuangan. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan 10 item pertanyaan dengan pengukuran skala likert 1-5.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang sudah dievaluasi dan ditetapkan oleh Gubernur Bali dengan perda nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dengan total 465 pegawai bagian keuangan. Adapun Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 93 orang, dimana diambil dari pegawai keuangan (Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staff Keuangan). Pengambilan sampel dari masing-masing OPD diambil sebanyak 3 orang. Teknik Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampling. Sehingga, kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Pegawai Bagian Keuangan, Dimana responden pernah ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.

Uji validitas ini digunakan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur tersebut benar-benar menguji dan mengukur konsep yang seharusnya

perlu diukur (Ghozali, 2016). Sedangkan Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016).

Uji Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan Anova merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil, Sedangkan Uji Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan yang linier antara variabel independen maka dapat dikatakan model terkena masalah multikolinearitas. Jika terjadi hubungan antar sesama variabel independent maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar independen sama dengan nol. Dan Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika nilai signifikansi diatas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Analisis Regresi Berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model persamaan linier yang dipakai dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

a = Konstanta

B_{1-3} = Koefisien Regresi

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Sistem Informasi

X_3 = Kualitas Teknologi Informasi

e = *error*

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien Determinasi adalah nol dan satu nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel variabel dependen (Ghozali, 2016), Sedangkan Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikasi secara bersama - sama semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dan Uji t yang disebut sebagai uji signifikasi individu (Ghozali, 2016) uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah 93 orang, dimana diambil dari pegawai keuangan (Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staff Keuangan) yang pernah ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Pengiriman 93 kuesioner kepada Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staff Keuangan pada tanggal 9 januari 2020 sampai tanggal 29 januari

Adapun karakteristik yang terkumpul melalui pengumpulan kuesioner adalah sebagai berikut, Pada identitas responden menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 93 orang pada identitas responden berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 59 orang dengan presentase sebesar 63,4 persen, Pada identitas responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden sebagian besar responden berusia 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 43 orang atau 46,2 persen

Berdasarkan hasil validitas responden maka dapat dilihat bahwa seluruh koefisien korelasi seluruh indikator variabel pada penelitian lebih besar dari 0,30, sehingga semua instrumen *Valid*. Berdasarkan hasil uji reabilitas dapat dilihat nilai nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap instrumen tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga semua instrumen reliabel.

Berikut hasil uji usumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Normalitas		Uji Multikolinieritas		Uji Heteroskedastisitas
	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Tolerance	VIF	Sig
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,493	0,968	0,422	2,368	0,989
Sistem Informasi			0,530	1,885	0,960
Kualitas Teknologi Informasi			0,605	1,654	0,926

Sumber: *Lampiran 9*

Berikut hasil uji usumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas sebagai berikut, Berdasarkan tabel 4.3 uji normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,968 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, Sedangkan berdasarkan tabel 4.3 uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan memiliki nilai VIF < 10 . Hal ini berarti bahwa pada model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinieritas. Dan berdasarkan tabel 4.3 uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti didalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi		Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,680	0,131	0,409	5,173	0,000
Sistem Informasi	0,767	0,229	0,236	3,348	0,001
Kualitas Teknologi Informasi	0,719	0,128	0,371	5,619	0,000
(Constant)	: 3,705				
F Statistik	: 96,808				
Sig F	: 0,000				
R ²	: 0,765				
Adjusted R ²	: 0,758				

Sumber: *Lampiran 10*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresinya menjadi

$$Y = 3,705 + 0,680X_1 + 0,767X_2 + 0,719X_3 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diinterpretasikan dari koefisien regresi yaitu, Diperoleh nilai α sebesar 3,705, secara statistik menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi dan kualitas teknologi informasi tidak mengalami perubahan maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan sebesar konstan 3,705, Nilai koefisien regresi β_1 kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,680, ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan kompetensi sumber daya manusia maka akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, Nilai koefisien regresi β_2

sistem informasi sebesar 0,767, ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sistem informasi maka akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis AkruaI, Nilai koefisien regresi β_3 kualitas TI sebesar 0,719, ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan kualitas teknologi informasi maka akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,758. hal ini berarti 75,8% variasi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI dapat dijelaskan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi dan kualitas teknologi informasi. Sedangkan sisanya (100% - 75,8%) = 24,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Berdasarkan (Uji F) pada tabel 4.4 menunjukkan nilai F sebesar 96,808 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi dan kualitas teknologi informasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI. Dengan demikian, maka model penelitian dianggap layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan

Berdasarkan pada tabel 4.4 diperoleh hasil uji t sebagai berikut, Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien regresi sebesar 0,680 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI, Sedangkan variabel sistem informasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,767 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti variabel sistem

informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dan variabel kualitas teknologi informasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,719 dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti variabel kualitas teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, diperoleh koefisien regresi β_1 variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,680 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, Berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien, Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri, Silviana (2017), Sari, Suprasto dan Dwirandra (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pengaruh sistem informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, diperoleh koefisien regresi β_2 variabel sistem informasi sebesar 0,767

dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sistem informasi memegang peranan penting dalam penerapan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis, dengan adanya komunikasi yang baik produktivitas akan meningkat khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, Menurut Menurut Warsino (2009).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permana dan Wiratmaja (2016), Putra (2016) menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, diperoleh koefisien regresi β_3 variabel kualitas teknologi informasi sebesar 0,719 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kualitas teknologi informasi dilihat dari kualitas perangkat keras, Hal ini diketahui dari tersedianya komputer dan perangkat keras lainnya dengan jumlah yang cukup di bagian keuangan Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang

diterapkan, Proses ini berjalan secara lancar apabila perangkat keras, perangkat lunak dan operator memiliki kualitas yang baik.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deswati Supra, SE.,M.Si (2016) dan Puspitarini, dkk (2017) menyatakan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka nantinya akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, Sedangkan sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem informasi yang digunakan maka akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dan kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas teknologi informasi yang digunakan maka nantinya akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah provinsi bali hendaknya terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan atau diklat akan

meningkat kompetensi pegawai. Pemerintah provinsi bali diharapkan terus mengawasi dengan baik penerapan sistem informasi yang digunakan agar nantinya sistem informasi yang digunakan dapat diterapkan dengan baik. pemerintah provinsi bali hendaknya memperbaharui kualitas teknologi informasi yang digunakan agar lebih mudah digunakan sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Denpasar. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Universitas Hindu Indonesia Denpasar*.
- Gede Bayu Permana Ida Bagus, I Dewa Nyoman Wiratmaja. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.3 September (2016): 2260-2287, ISSN: 2302-8556.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlina Sari Fenty, Bambang Suprasto, A.A.N.B Dwirandra. 2016. Motivasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi dan Teknologi Informasi pada Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.8. 2016: 2403-2430, ISSN: 2337-3067.
- Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali. <https://www.baliprov.go.id/web/>.
- Puspitarini Intan, Amrie Firmansyah, Dian Handayani. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal*

of Applied Managerial Accounting, Vol. 1, No. 2, 2017, 141-149, ISSN: 2548-9917.

Putra dan Amar. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, Bandung, 20 juli 2017, ISSN-2252-3936.

Supra Deswati, S.E., M.Si. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*, Volume V, No.2, Agustus 2016, h. 9-23.

Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta. BPF. https://www.academia.edu/37604065/PENGERTIAN_TEORI_AKUNTANSI.

Thahier. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Regulasi dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI (Studi pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali). <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/1612/1/132221015%20%20TRI%20KHASANAH%20BUDI%20UTAMI.pdf>.

Utami Putri Dewi, Silviana. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, Bandung, 20 juli 2017, ISSN-2252-3936.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. <http://www.sanitasi.net/undang-undang-nomor-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara.html>.

Undang-Undang No 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152400.pdf.

Undang-Undang No 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. <https://www.iogloabang.com/pustaka/uu-15-2004-pemeriksaan-pengelolaan-tanggung-jawab-keuangan-negara>.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/16836>.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019. Tentang atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/24814>.